



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEMESTER I TAHUN 2023
BPSDM HUKUM DAN HAM





Penyusun :

Tim Penyusun LKjIP BPSDM Hukum dan HAM 2023

BPSDM Hukum dan HAM

Jl. Raya Gandul No. 4

Depok Jawa Barat, 16512

Telp . 021-7540123

www.bpsdm.kemenkumham.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSDM) Manusia Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Semester I Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan sasaran program berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan selama periode semester I tahun 2023. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPSDM Hukum dan HAM yang telah berkontribusi positif pencapaian kinerja melalui pencapaian sasaran strategis dan sasaran program yang menjadi tanggung jawab Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Depok, 7 Juli 2023

Kepala BPSDM Hukum dan HAM



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Iwan Kurniawan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM. Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

BPSDM Hukum dan HAM dalam rencana kinerjanya mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM yang diimplementasikan dalam bentuk Sasaran Strategis **Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM** serta Sasaran Program **Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM dan Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasarakatan dan Keimigrasian**. Sasaran Strategis dan Sasaran Program tersebut memiliki indikator kinerja dengan target yang harus dipenuhi. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, BPSDM Hukum dan HAM melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik (semesteran).

Sampai dengan akhir semester I Tahun 2023, jumlah indikator kinerja yang dapat diukur realisasi sebanyak 4 buah indikator kinerja, 2 indikator kinerja merupakan indikator pada Sasaran Strategis serta 2 buah indikator kinerja pada Sasaran Program. Sementara 2 buah indikator kinerja pada sasaran program belum bisa diukur realisasi dan capaiannya karena baru dijadwalkan baru bisa dilaksanakan pada periode semester berikutnya. Sebanyak 3 indikator dari 4 indikator kinerja baik pada sasaran strategis maupun sasaran program yang bisa diukur telah melebihi target yang telah ditentukan antara lain:

1. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya (Indikator Kinerja Sasaran Strategis)

2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi (Indikator Kinerja Sasaran Program)
3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya (Indikator Kinerja Sasaran Program)

Secara rinci, kondisi capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM sampai dengan Semester I Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	80%	6,64%	8,3%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	95%	96,8%	101,9%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	90%	0%	0%
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	93%	133,4%	143,5%
		3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	93%	96,8%	104,1%
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	0%	0%

Adapun dari sisi anggaran, pada periode Semester I Tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 99.535.790.576,-** atau

32,67% dari pagu yang dikelola sebesar **Rp. 304.694.164.000,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas fungsi BPSDM Hukum dan HAM yang diimplementasikan kedalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM
2. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM
5. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIM)
6. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIP)
7. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Jateng)
8. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Kepri)
9. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Sulut)

Dari hasil realisasi kinerja dan anggaran tersebut dapat disampaikan bahwa capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM sampai dengan Semester I secara umum cukup baik, meskipun masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi target. Untuk itu dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya perlu kebijakan dan usaha untuk percepatan pencapaian target pada indikator kinerja serta realisasi anggaran di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		ii
Daftar Hadir		iii
Bab I Pendahuluan		iv
A. Latar Belakang		1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi		2
C. Maksud dan Tujuan		8
D. Aspek Strategis		9
E. Isu Strategis		9
F. Sistematika Pelaporan		10
Bab II Perencanaan Kinerja		12
A. Rencana Strategis		12
B. Perjanjian Kinerja		18
Bab III Akuntabilitas Kinerja		20
A. Capaian Kinerja Organisasi		20
1. Capaian Indikator Kinerja Utama		22
2. Capaian Indikator Kinerja Program		30
B. Realisasi Anggaran		40
C. Capaian Kinerja Anggaran		42
D. Efisiensi Sumber Daya		43
E. Efisiensi Anggaran		44
F. Capaian Kinerja Lainnya		45
Bab IV Penutup		55
A. Kesimpulan		55
B. Saran		57
Lampiran		59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Keberadaan BPSDM Hukum dan HAM sebagai sebuah unit kerja setingkat eselon I dengan demikian merupakan ujung tombak Kementerian Hukum dan HAM dalam pengembangan kompetensi Aparatur Hukum dan HAM. Tanggung jawab yang semakin besar ini semakin menguat manakala kita merujuk pada data demografi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana Kemenkumham memiliki lebih dari 64.000 orang pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsinya pada unit-unit Pusat dan Daerah serta ratusan Unit pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Belum lagi tuntutan peran mengiringi perkembangan lingkungan (utamanya eksternal) dimana masyarakat semakin kritis menuntut peran maksimal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelayanan publik. Dengan demikian organisasi ini tidak lagi sekedar memiliki kewajiban pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur Hukum dan HAM agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM sebaik-baiknya. Perkembangan substansi pengembangan aparatur sipil negara (ASN) seiring berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan demikian menjadi prospektif baru dalam pelaksanaan tugas BPSDM Hukum dan HAM.

Upaya responsif yang kemudian dilakukan adalah kembali mengubah nomenklatur unit kerja ini melalui Permenkumham No. 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan konsidren

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam nomenklatur baru tersebut BPSDM Hukum dan HAM memiliki peran baru berupa penilaian kompetensi (assessment) aparatur sipil negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan selebihnya dalam nomenklatur baru lebih merupakan penyesuaian agar pelaksanaan tugas menjadi lebih lugas.

Peran dan tanggung jawab baru BPSDM Hukum dan HAM ini sesungguhnya telah dimulai BPSDM Hukum dan HAM jauh sebelum nomenklatur ini berlaku, dimana BPSDM Hukum dan HAM memiliki program pendekatan *competency based human resources management system* (CBHRM), sebagai suatu pendekatan mutakhir dalam manajemen sumber daya manusia (SDM), yang mengintegrasikan strategi organisasi dengan sistem manajemen SDM. Sistem ini mencakup pengembangan model kompetensi yang berkaitan dengan strategi pengembangan SDM (*competency based training and development*), sehingga kompetensi yang dikembangkan akan tetap sesuai dengan strategi dan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM baik *soft skill*, *social skill* dan *mental skill*.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, BPSDM Hukum dan HAM melihat perlunya metode baru dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur di bidang hukum dan HAM sejalan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 terkait pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN. Pada tahun 2020, BPSDM Hukum dan HAM meluncurkan sistem pengembangan kompetensi terintegrasi dalam skema **Kemenkumham Corporate University** yang diwujudkan melalui 4 (empat) pilar yaitu: **Learning Process, Knowledge Manajemen Process, People Process** dan **Network and Partnership Process**. Strategi peningkatan kompetensi SDM melalui **Kemenkumham Corporate University** diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akan kehadiran SDM yang berkualitas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kehakiman Nomor YS.4/3/7 Tahun 1975 tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Kehakiman merupakan cikal-bakal organisasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki peran sebagai unit kerja pengembangan kompetensi aparatur Hukum dan HAM. Seiring perkembangan dan tanggung jawab kementerian maka organisasi ini meningkat peran dan tanggung jawabnya menjadi unit kerja setingkat eselon I, menjadi Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dikenal dengan BPSDM Hukum dan HAM.

Sebagai sebuah sub unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman, Pusdiklat Departemen Kehakiman memiliki tugas pokok sebatas mendidik dan melatih pegawai Departemen Kehakiman dalam konteks pengembangan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Pusdiklat Departemen Kehakiman kemudian berganti nama seiring perubahan kabinet menjadi Pusdiklat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Pusdiklat Depkehham), kemudian menjadi Pusdiklat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pusdiklat Depkumham), dengan tugas pokok, fungsi, dan peran yang sama sebagai unit kerja pengembangan kompetensi pegawai departemen.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, dimana peran dan tanggung jawab yang semakin besar, unit kerja ini dituntut untuk lebih responsive dengan perkembangan lingkungan, dituntut untuk menjadi sebuah unit kerja yang memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar daripada sekedar unit kerja setingkat Pusat (eselon II). Unit kerja ini kemudian mengalami transformasi menjadi sebuah unit kerja setingkat eselon I yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, tanggal 2 Nopember 2006. Harapan Kementerian Hukum dan HAM untuk kinerja unit kerja ini menjadi tuntutan mutlak terhadap akselerasi perubahan lingkungan eksternal yang berimbas pada kompleksitas dan beban kerja dalam pengembangan SDM Aparatur Hukum dan HAM, untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional di Bidang Hukum dan HAM. Termasuk di dalamnya adalah tuntutan untuk menjadi unit kerja yang membawahi Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM, Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan, Pusat Penilaian Kompetensi, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP), Politeknik Imigrasi (POLTEKIM), Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

1. Tugas BPSDM Hukum dan HAM

BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Fungsi BPSDM Hukum dan HAM

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 423 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021, BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

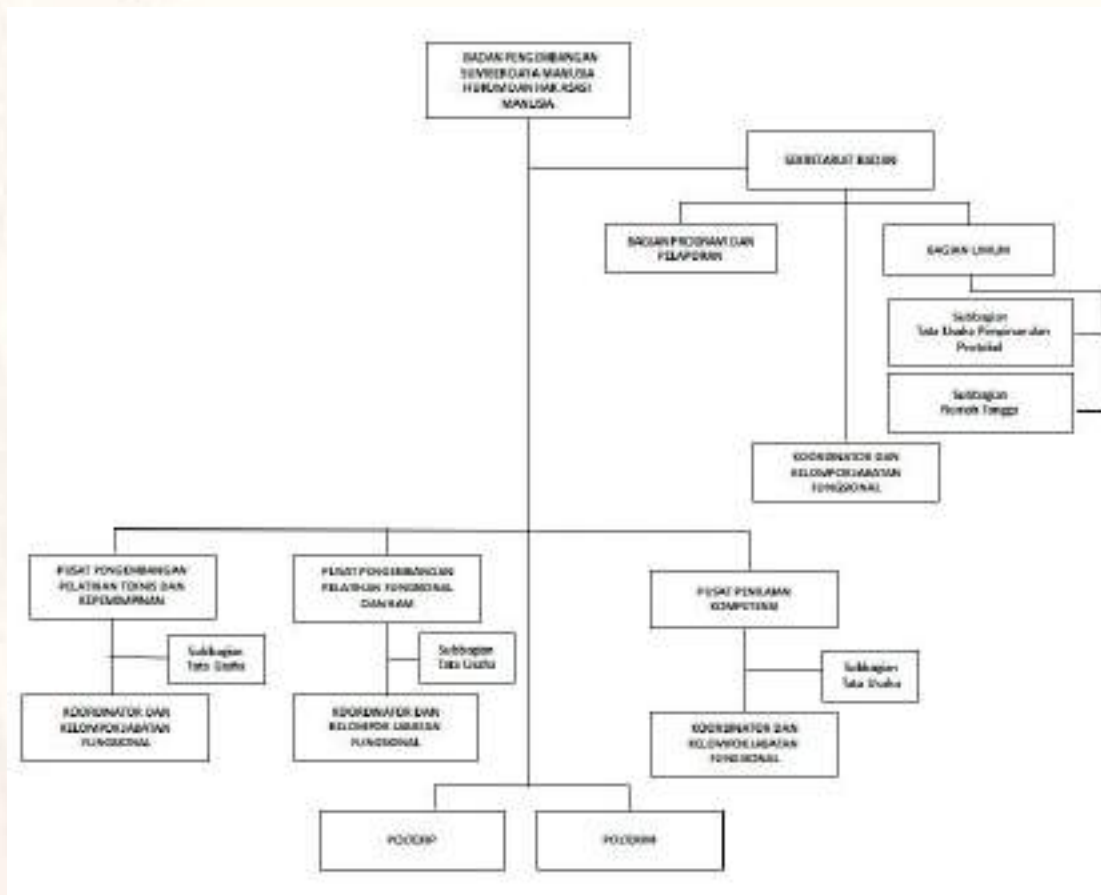
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM terdiri dari beberapa satuan kerja yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:

- a. **Sekretariat Badan** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; pelaksanaan urusan keuangan; pengelolaan urusan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan umum; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan BPSDM Hukum dan HAM; pelaksanaan dan koordinasi kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan HAM; dan pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan BPSDM Hukum dan HAM.
- b. **Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan** mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan

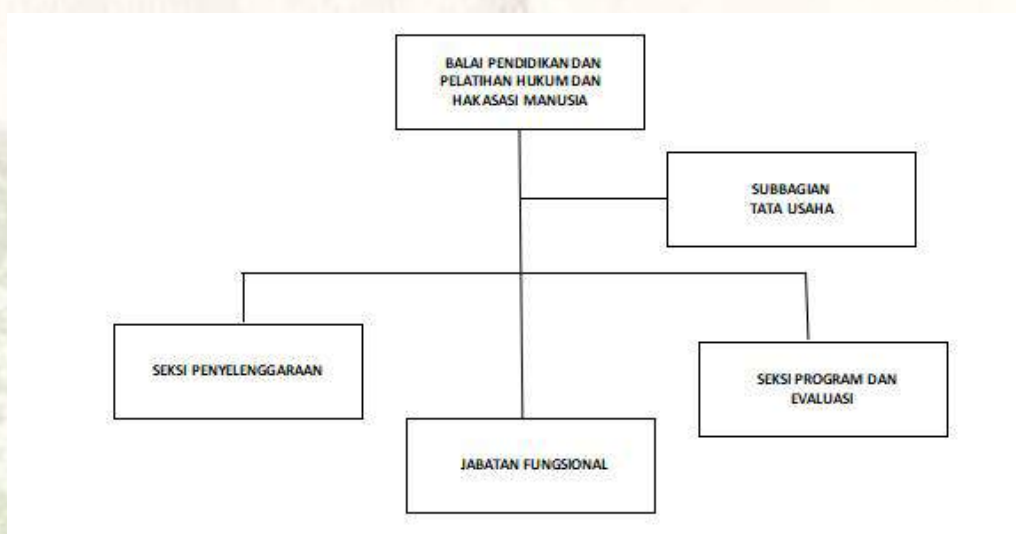
pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; dan pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

- c. **Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM** mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; dan pelaksanaan urusan tata usaha pusat.
- d. **Pusat Penilaian Kompetensi** mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi dan pengelolaan sistem informasi bidang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi: penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penilaian kompetensi; penyusunan standardisasi dan penilaian kompetensi; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penilaian kompetensi; pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia; dan pelaksanaan urusan tata usaha pusat.
- e. **Politeknik Ilmu Pemasarakatan** memiliki tugas menyelenggarakan Pendidikan kedinasan di bidang pemasarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekip memiliki fungsi : pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Ilmu Pemasarakatan serta melakukan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Pemasarakatan.
- f. **Politeknik Imigrasi** memiliki tugas menyelenggarakan Pendidikan kedinasan di bidang keimigrasian. Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekim memiliki fungsi : pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Keimigrasian serta melakukan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Keimigrasian.
- g. BPSDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis **Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM** yang berada di Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara dengan tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

Gambar Struktur Organisasi BPSDM Hukum dan HAM

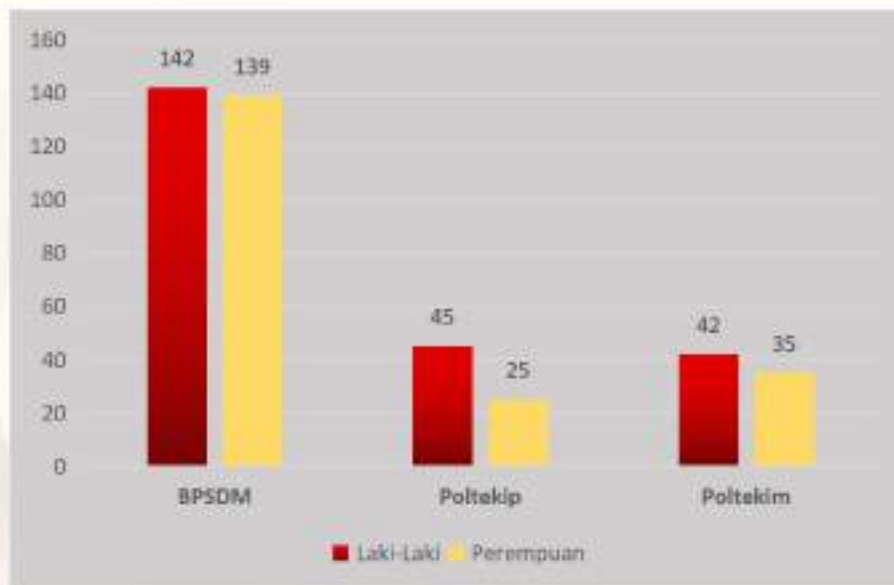


Gambar Struktur Organisasi Balai Diklat Hukum dan HAM

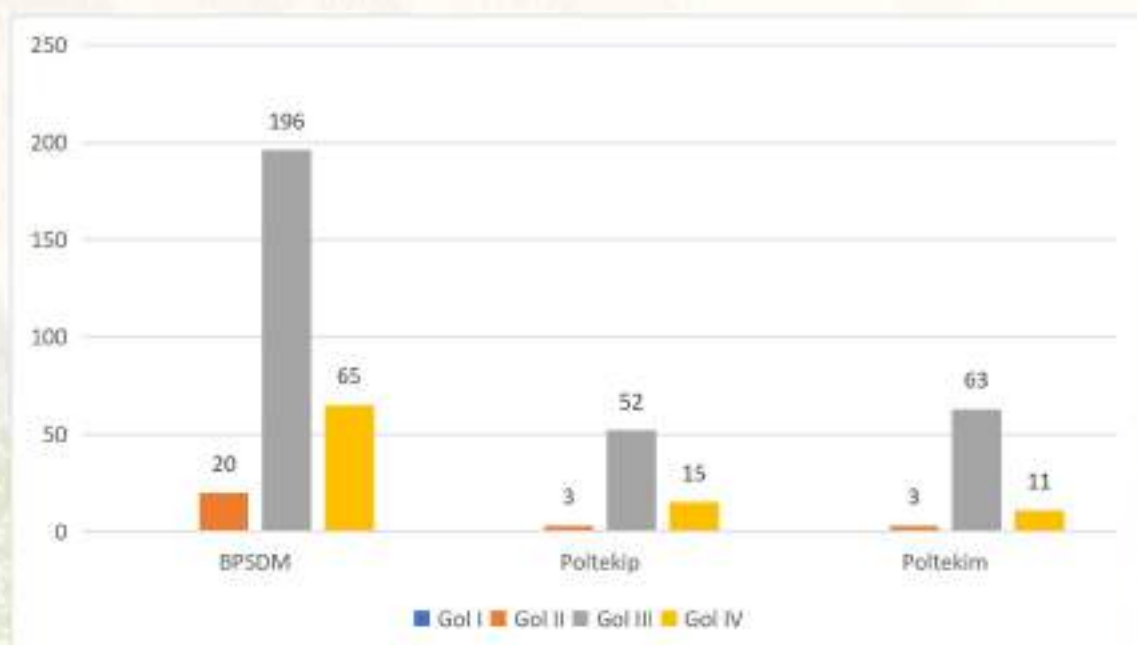


BPSDM Hukum dan HAM untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengembangan SDM di bidang hukum dan HAM didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 428 orang dengan berbagai latar pendidikan dan golongan kepangkatan.

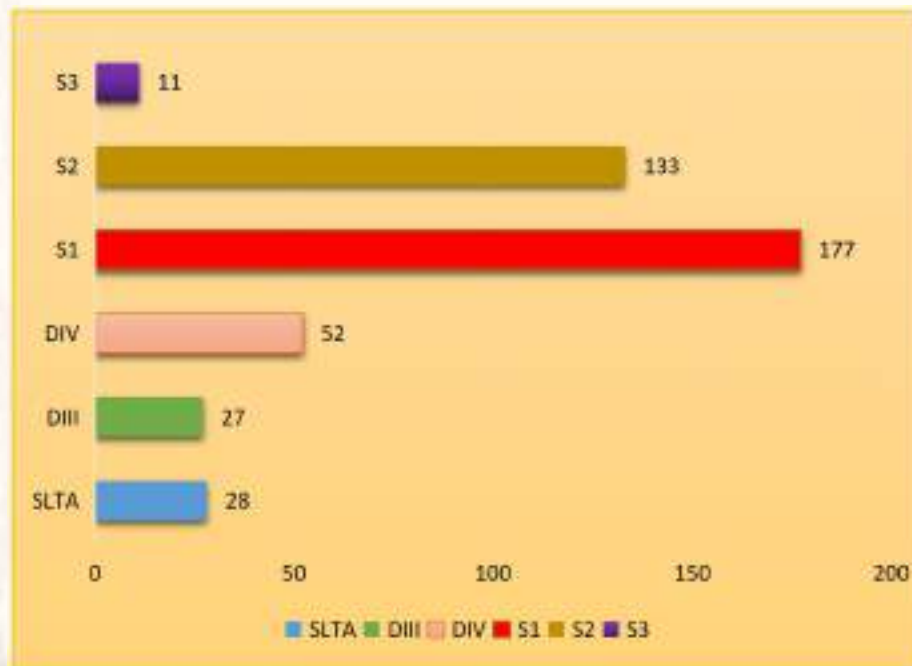
Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan



Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



C. Maksud dan Tujuan

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDM Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 ini dimaksudkan selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu semester pertama tahun 2023. Dalam laporan ini disajikan pula progres pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi perkembangan capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPSDM Hukum dan HAM untuk meningkatkan kinerjanya di periode berikutnya.

D. Aspek Strategis

Amanah pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang dimandatkan kepada BPSDM Hukum dan HAM tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 201 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Peningkatan kualitas SDM aparatur negara merupakan upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk menjawab tantangan masa kini yang dihadapi oleh organisasi seperti tingginya jumlah pegawai, tingginya jumlah pegawai generasi milenial, era disrupsi dan perkembangan era industry 4.0. Di sisi lain, tingginya jumlah pegawai tersebut belum diikuti dengan ketersedianya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Tantangan dan keterdesakan lingkungan kerja yang sukses memanfaatkan teknologi, membuktikan bahwa strategi pengembangan Sumber Daya Manusia tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem konvensional. Pembentukan budaya kerja dalam lingkup sebagai organisasi pembelajar juga harus dikembangkan. Maka dengan tantangan dan desakan zaman, BPSDM Hukum dan HAM berusaha untuk melakukan penyesuaian, berikut penyesuaian yang ingin diterapkan:

1. Pembangunan SDM bidang hukum dan HAM yang yang berkompetensi tinggi melalui rumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan sosio-kultural SDM Hukum dan HAM melalui rumusan kebijakan dan penyelenggaraan program pengembangan terintegrasi dalam skema *Corporate University*

E. Isu Strategis

Potensi munculnya permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja pada suatu organisasi pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. BPSDM sebagai suatu organisasi di bidang pemerintahan, dalam konteks internal kelembagaan memiliki beberapa isu strategis yang bisa menjadi potensi permasalahan dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada sisi sumber daya manusia masih belum terpetakannya profil kompetensi yang disertai belum

maksimalnya analisis jabatan dan beban kerja mengakibatkan belum meratanya kompetensi pegawai, beban kerja yang tidak merata serta penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya.

Disamping hal tersebut terdapat beberapa kompetensi yang masih sangat membutuhkan pengembangan lebih lanjut serta kebutuhan dalam hal peningkatan etos dan budaya kerja profesional pegawai BPSDM Hukum dan HAM. Pada sisi sarana dan prasarana, meskipun didukung oleh prasarana yang luas dan cukup memadai, tetapi fakta dilapangan kondisi fisik sarana dan prasarana saat ini belum bisa mendukung untuk tercapainya *Smart Office* dan *Smart Class Room*. Kondisi asrama baik untuk peserta pelatihan maupun taruna/taruni politeknik sudah mengalami penurunan kualitas yang berdampak pada kualitas proses pembelajaran.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan LKJIP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan tugas dan fungsinya penekanan pada aspek peran strategis BPSDM Hukum dan HAM, serta isu strategis unit organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian ringkasan/ikhtisar rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 berdasarkan anggaran yang telah disetujui.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap Indikator Kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja yang telah ditentukan. Disamping menguraikan capaian kinerja, bab ini juga menyajikan data realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Untuk menunjang data realisasi anggaran tersebut maka perlu didukung dengan menyajikan capaian Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Sebagai bentuk pelaporan kinerja, LKjIP BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 juga menyajikan capaian kinerja lainnya antara lain pengisian data capaian pada beberapa

aplikasi monitoring kinerja seperti Aplikasi E-Performance, Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM dan e-Monev BAPPENAS serta pelaksanaan Program Prioritas Nasional yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran yang menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi,

bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk; mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang

bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang telah disusun tersebut kemudian diimplementasikan oleh Unit dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan.

Untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM tersebut maka disusunlah Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024. Renstra Kemenkumham merupakan pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang kemudian diturunkan untuk menjadi Rencana Strategis masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024 merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024. Sasaran strategis disusun melalui pendekatan 4 perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
Mengacu kepada posisi seperti apa yang harus dicapai oleh organisasi di mata para pemangku kepentingannya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.
2. Perspektif Proses Internal
Perspektif ini mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai oleh organisasi dalam hal proses bisnis internalnya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai dalam hal atribut, karakteristik atau kinerja SDM dan kelembagaan organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

4. Perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran

Untuk perspektif ini mengacu kepada bagaimana seharusnya kinerja organisasi dalam hal keuangan atau disiplin anggaran.

Tabel Sasaran Strategis BPSDM Hukum dan HAM

Perspektif	Sasaran Strategis
Pemangku Kepentingan	Menjadi unit utama yang dapat bekerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM dengan pemangku kepentingan
Proses Internal	1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi berbasis TI 2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan terakreditasi 3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI, Penyelenggara, dan Pengelola) 4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir 5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas
Pembelajaran dan Pertumbuhan	1. Memiliki SDM fungsional dan penunjang yang berkompetensi tinggi dan terkreditasi 2. Membentuk organisasi yang optimal dan efektif dalam menjalankan fungsi dan peran 3. Menjalin kerjasama sinergis dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik
Disiplin Anggaran	Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan akuntabel

Visi Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Tujuan Strategis BPSDM Hukum dan HAM:

Meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan SDM berbasis Corporate University



CROSS-CUTTING KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM

Visi Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Kementerian Hukum dan HAM

Misi-7: Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

Sasaran Strategis 7

Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

1. IKU-1 Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
2. IKU-2 Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

Sasaran Program 1

Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

1. IKP-1 Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna
2. IKP-2 Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi
3. IKP-3 Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya

Sasaran Program 2

Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian

1. IKP-1 Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka setiap tahun setiap lembaga pemerintahan diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja antara pimpinan lembaga tersebut dengan atasan langsung sebagai bentuk komitmen penerima amanah (pimpinan lembaga) dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah (atasan pimpinan lembaga) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM adalah dokumen berisikan penugasan dari Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah kinerja BPSDM Hukum dan HAM menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini diselaraskan dengan rencana kinerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan Menteri Hukum dan HAM

Tabel Sasaran Strategis dan Sasaran Program Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	80%
		Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	95%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	90%
		Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	93%
		Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	93%
2.	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%

Untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tiap-tiap indikator pada sasaran strategis dan sasaran program tersebut, BPSDM Hukum dan HAM pada awal tahun diberikan pagu tahun 2023 sebesar Rp. 255.408.806.000,- yang terbagi menjadi 9 rincian kegiatan. Namun, ditengah tahun berjalan terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* serta penambahan anggaran sehingga anggaran yang tersedia sebesar Rp. 304.694.164.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)	Pagu Anggaran (Akhri)
1	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIP)	Rp. 43.260.590.000,-	Rp. 43.260.590.000,-
2	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIM)	Rp. 41.637.219.000,-	Rp. 41.637.219.000,-
3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM	Rp. 10.959.787.000,-	Rp. 10.959.787.000,-
4	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur	Rp. 3.920.800.000,-	Rp. 3.920.800.000,-
5	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	Rp. 17.921.325.000,-	Rp. 57.654.155.000,-
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 102.044.171.000,-	Rp. 111.596.699.000,-
7	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Kepri)	Rp. 8.910.874.000,-	Rp. 8.910.874.000,-
8	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Jateng)	Rp. 14.287.752.000,-	Rp. 14.287.752.000,-
9	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Sulut)	Rp. 12.466.288.000,-	Rp. 12.466.288.000,-
Total		Rp. 255.408.806.000,-	Rp. 304.694.164.000 , -



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Suatu kinerja pada umumnya harus memiliki kriteria atau indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu bisa berupa tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Dengan adanya tujuan atau target yang telah ditetapkan tersebut kinerja seseorang ataupun organisasi bisa diukur tingkat keberhasilannya. Dan setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan atau target yang telah ditentukan. Perwujudan pertanggungjawaban kinerja tersebut dihitung berdasarkan target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan

Akuntabilitas kinerja BPSDM Hukum dan HAM merupakan perwujudan atas kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rencana Kerja 2023 BPSDM Hukum dan HAM untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Perwujudan pertanggungjawaban kinerja tersebut dihitung berdasarkan target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2023.

Tingkat keberhasilan dan kegagalan yang dicapai dilakukan dengan pengukuran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1. Melebihi Target Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.

2. Tercapai / Sesuai Target Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau.
3. Tidak Tercapai Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% ditandai dengan warna merah

Range	Tingkat Capaian Kinerja	Kode Warna
> 100%	Melebihi Target	
= 100%	Tercapai / Sesuai Target	
< 100%	Tidak Tercapai	

Berikut hasil pengukuran untuk progres realisasi dan capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis dan sasaran program yang menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM pada periode semester I tahun 2023

Tabel Capaian Indikator Kinerja Semester I Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	80%	6,64%	8,3%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	95%	96,8%	101,9%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	90%	0%	0%
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	93%	133,4%	143,5%
		3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidangnya	93%	96,8%	104,1%

2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	0%	0%
Total			546%	333,64%	
Formulasi			<u>Total Nilai Realisasi</u> Jumlah Indikator Kinerja <u>333,64</u> 6		
Nilai Kinerja Organisasi			55,6		

Tabel capaian indikator kinerja diatas memberikan informasi bahwa belum seluruh indikator kinerja yang menjadi tugas BPSDM Hukum dan HAM sampai dengan semester I memenuhi target yang ditetapkan. Progres capaian kinerja juga bisa dilihat pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPSDM Hukum dan HAM sampai dengan semester I sebesar **55,6** yang masuk kedalam kategori **Kurang**. Namun, hal ini tidak bisa dijadikan kesimpulan bahwa BPSDM Hukum dan HAM tidak berkinerja dengan baik, mengingat capaian ini hanya merupakan progres capaian kinerja pada tahun 2023. Capaian kinerja semester I ini merupakan bahan informasi dan evaluasi bagi pimpinan BPSDM Hukum dan HAM untuk menentukan kebijakan dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja tahun 2023 yang telah ditentukan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Kinerja BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 diimplementasikan melalui Program Dukungan Manajemen dalam rangka mendukung pencapaian salah satu misi Kementerian Hukum dan HAM **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan**”, serta mengampu 1 Sasaran Strategis Menteri Hukum dan HAM yaitu Sasaran Strategis 7 **Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM**”.

BPSDM Hukum dan HAM menetapkan dua buah indikator kinerja atas pencapaian kinerja sasaran strategis (SS) ini yaitu :

- Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;
- Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

Berikut penjelasan dan identifikasi capaian pada masing-masing indikator kinerja utama pada sasaran strategis tersebut:

❖ IKU -1 Presentase ASN Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Salah satu indikator tercapainya sasaran strategis ini adalah **Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan**. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah persentase ASN di bidang hukum dan HAM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan PNS diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap ASN wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural, dan kompetensi teknis. BPSDM Hukum dan HAM sebagai penanggung jawab atas capaian indikator ini telah melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi terhadap aparatur di bidang hukum dan HAM untuk mengukur capaian indikator kinerja ini, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Kegiatan Penilaian Kompetensi Semester I

No	Kegiatan Penilaian Kompetensi	Tanggal Pelaksanaan	Realisasi
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM			419
1	Kantor Wilayah D.I Yogyakarta	27 Februari - 3 Maret	59
2	Kantor Wilayah Maluku Utara	27 Februari - 3 Maret	60
3	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	8-12 Mei	60
4	Kantor Wilayah Kepri	22 mei - 26 mei	60
5	Kantor Wilayah Gorontalo	12-16 juni	60
6	Kantor Wilayah Jambi	19-23 juni	60
7	Kantor Wilayah Papua	19-23 juni	60
Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang Bagi Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM			688
9	Penilaian Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama Melalui	14 - 16 Februari	17

	Perpindahan Dari Jabatan Lain		
10	Uji Kompetensi dan Uji Potensi Pengangkatan dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Bagi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2023	28 Februari - 01 Maret	15
11	Penilaian Kompetensi Bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023	07 - 14 Maret	86
12	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemetaan Kompetensi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	14 - 17 Maret	165
13	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.	03 - 11 April 2023	207
14	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan JF Perancang Perundang-undangan	29 -31 Mei 2023	115
15	Penilaian Kompetensi Jabatan Analis Hukum (perpindahan jabatan)	13-14 Juni 2023	83
Penilaian Preferensi Kompetensi Dengan Metode Online			105
16	Penilaian Preferensi Kompetensi Dengan Metode Online	Maret - November	
17	Penilaian Potensi di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	19 Mei	74
18	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Lingkungan Kemenkumham (SJT)	7 Juni	31
Total			1.212

Dari total 1.212 peserta penilaian kompetensi pada tabel di atas, sebanyak 964 peserta dinilai memenuhi standar kompetensi jabatan. Hasil ini berdasarkan penilaian oleh asesor atas yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membuat Laporan Parsial (menilai hasil wawancara, menilai hasil analisa kasus, menilai hasil LGD, Proposal writing, presentasi);
2. Melakukan integrasi data hasil penilaian;
3. Melakukan asesor *meeting* (antar asesor) untuk menentukan nilai level berdasarkan hasil kompilasi antara simulasi yang satu dengan yang lainnya;

4. Input hasil asesor meeting ke form rekapitulasi asesor meeting serta membuat rekap asesor *meeting*;
5. Membuat Laporan Individu.

Dari data tersebut, kemudian dilakukan penghitungan realisasi dengan formulasi sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{964}{14.520} \times 100\%$$

$$Realisasi = 6,64\%$$

$\sum N$ = Jumlah peserta penilaian kompetensi yang memenuhi standar kompetensi jabatan

$\sum X$ = jumlah peserta penilaian kompetensi

Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKU-1, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{6,64}{80} \times 100\%$$

$$Capaian = 8,3\%$$

Tabel Capaian IKU-1 Semester I

SASARAN STRATEGIS:		
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA UTAMA:		
Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
80%	6,64%	8,3%

Tabel Realisasi IKU-1 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
2,73%	3.91%	-	-

Berdasarkan target yang ditetapkan IKU **Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan** memiliki target sebesar 80%. Berdasarkan penghitungan dari data dukung capaian kinerja, progres realisasi indikator kinerja ini sampai dengan semester I sebesar **6,64%**. Dari progres realisasi yang diperoleh maka capaian kinerja untuk indikator kinerja utama ini sebesar **8,3%**, dengan kata lain untuk indikator ini progres realisasinya masih jauh dari target yang telah ditentukan. Untuk periode berikutnya perlu disiapkan strategi percepatan untuk bisa memenuhi yang telah ditentukan.

Tabel Perbandingan Capaian IKU-1 Semester I

Indikator Kinerja Utama	Semester I 2022			Semester I 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	75%	42.3%	56,4%	80%	6,64%	8,3%

Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada semester I tahun sebelumnya, capaian pada semester I tahun 2023 mengalami penurunan. Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama ini antara lain. Adapun hal yang menyebabkan masih rendahnya progres realisasi salah satunya untuk menghindari duplikasi data peserta dalam pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial, sosial kultural dan uji potensi output sejumlah 13.620 orang kegiatan *Situational Judgement Test* (SJT) menunggu hasil kegiatan dari Biro Kepegawaian yang telah dilaksanakan penilaian kompetensi dan potensi di kantor wilayah. Sebagai perbaikan penyelenggaraan penilaian kompetensi di semester berikutnya dalam rangka memenuhi target indikator kinerja ini antara lain koordinasi terus menerus dengan Biro Kepegawaian yang menyelenggarakan penilaian kompetensi secara mandiri di Kantor Wilayah untuk memastikan jadwal dan peserta kegiatan agar tidak terjadi duplikasi pemanggilan peserta penilaian kompetensi.

❖ **IKU - 2 Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya**

BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit eselon I yang memiliki tugas menyelenggarakan pengembangan kompetensi di bidang hukum dan HAM melalui berbagai pelatihan. Tujuan dari penyelenggaraan pelatihan tersebut adalah peningkatan kompetensi peserta pelatihan yang berdampak pada peningkatan kinerja alumni pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan.

Untuk melihat apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak maka perlu dilakukan pengukuran persentase banyaknya alumni diklat yang meningkat kinerjanya.

Peningkatan Kinerja dari alumni pelatihan diukur berdasarkan peningkatan kompetensi yang didapatkan peserta dari pelatihan yang diikuti dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh alumni, yang terdiri dari *Skill* (Keterampilan), *Knowledge* (Pengetahuan), dan *Attitude* (Sikap). Penilaian tersebut diukur berdasarkan persepsi Alumni, Atasan Langsung dan Rekan Kerja.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pelatihan melalui evaluasi pasca pelatihan terhadap responden alumni pelatihan secara sampling. Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan merupakan salah satu kegiatan yang melekat dari fungsi monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM dalam rangka memantau kualitas alumni pelatihan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara 360 derajat. Kuesioner yang dikembangkan menggunakan skala penilaian dengan rentang penilaian antara 1-5 (Skala Likert). Kuesioner didesain untuk lima jenis responden yaitu untuk alumni, atasan alumni, rekan kerja, bawahan dan penerima manfaat. Berikut hasil rekapitulasi kuesioner EPP untuk menghitung realiasi Indikator Kinerja **Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya**

Tabel Rekapitulasi Hasil Kuesioner IKU-2 Semester I

No	Satuan Kerja	Jumlah Responden	Jumlah Alumni Meningkat Kinerjanya	Persentase
1	Pusbanglat Fungham	222	222	100%
2	Pusbanglat Tekpim	40	38	96.94%
3	Badiklat Kepri	444	424	95,54%
	Total	706	684	96,8%

Dari data tersebut, kemudian dilakukan penghitungan realisasi dengan formulasi sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{684}{706} \times 100\%$$

$$Realisasi = 96,8\%$$

$\sum N$ = Jumlah responden yang meningkat kinerjanya

$\sum X$ = jumlah responden

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya** pada semester I sebesar **96,8%**. Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKU-2, hasil reaisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{96,8}{95} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 101,9\%$$

Tabel Capaian IKU-2 Semester I

SASARAN STRATEGIS:		
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA UTAMA: Persentase alumni Diklat yang meningkat kinerjanya		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
95%	96,8%	101,9%

Tabel Realisasi IKU-2 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
93,1	3,7	-	-

Realisasi capaian kinerja Indikator **Persentase alumni Pendidikan dan pelatihan yang meningkat kinerjanya** adalah **96,8%** yang artinya melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan pembejalaran telah berjalan dengan baik mulai dari penyelenggaraan sampai dengan proses evaluasi pasca pelatihan. Modul pelatihan dapat dipahami dengan baik oleh peserta, tenaga pengajar sebagian besar mampu dalam menyampaikan materi pelatihan, evaluasi yang komprehensif dan terdapat pedoman/petunjuk teknis yang jelas bagi peserta pelatihan baik secara klasikal maupun daring.

Tabel Perbandingan Capaian IKU-2 Semester I

Indikator Kinerja Utama	Semester I 2022			Semester I 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	90%	45,1%	50,1%	95%	96,8%	101,9%

Namun jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada semester I tahun sebelumnya, sampai dengan semester I capaian pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari capaian semester I tahun 2022. Meskipun capaian indikator kinerja semester I melebihi target yang ditetapkan, tetapi masih terdapat beberapa kendala antara lain:

1. Pada saat pengisian kuesioner secara daring, beberapa responden tidak mengisi kuesioner yang dikirimkan;
2. Beberapa pelatihan baru bisa diukur hasilnya setelah 6 bulan sejak pelatihan berakhir, sehingga tidak banyak responden pelatihan yang dapat diukur;
3. Beberapa peserta mendapatkan mutasi ke tempat kerja baru sebelum dilakukan evaluasi pasca pelatihan;
4. Wawancara tidak selalu dapat dilaksanakan secara maksimal karena keberadaan responden tidak berada di tempat;
5. Responden belum mengungkapkan permasalahan dan kendala secara objektif;
6. Belum semua pelatihan yang dilaksanakan memiliki pedoman EPP;
7. Keterbatasan anggaran perjalanan dinas mengakibatkan EPP metode klasikal tidak bisa dilakukan kepada seluruh alumni pelatihan

Sebagai perbaikan di tahun yang akan datang dalam memperoleh realisasi capaian indikator kinerja utama ini perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengukuran peningkatan kinerja alumni pelatihan kedepannya dapat diimplementasikan kedalam aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG;
2. Pemanfaatan kuesioner berbasis teknologi informasi secara maksimal, sehingga jumlah responden yang dilibatkan bisa lebih banyak;

3. Perlu disusun Peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM yang mengatur Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan yang dapat diaplikasikan pada seluruh pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM Hukum dan HAM dan satuan kerjanya, baik yang dilaksanakan secara klasikal maupun daring.

Disamping membandingkan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya. Berikut disajikan perbandingan target dan capaian indikator kinerja utama ini dengan instansi lain yang memiliki indikator serupa antara lain Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Berikut tabel perbandingan capaian kinerja pada indikator **Persentase alumni Pendidikan dan pelatihan yang meningkat kinerjanya**:

INSTANSI	Semester I 2022			Semester I 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
BPSDM	90%	45,1%	50,1%	95%	96,8%	101,9%
BPPK	82%	90,28%	110,10%	85%	N/A	N/A

2. Capaian Indikator Kinerja Program

Disamping memenuhi target pada indikator kinerja Sasaran Utama, kinerja BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 juga diukur dan diimplemetasikan melalui program dukungan manajemen dalam rangka mencapai Sasaran Program **Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM** dan **Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian** yang diukur berdasarkan capaian pada Indikator Kinerja Program :

1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna
2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi
3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya
4. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan

Adapun capaian masing-masing indikator kinerja program dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

❖ **IKP-1 Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna**

Indikator **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindak lanjuti oleh pengguna** bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan oleh unit pengguna. Dalam pencapaian indikator ini diperoleh dari rekapitulasi data survei Monitoring dan data dukung untuk memvalidasi data berupa dokumen seperti Surat Keputusan ataupun sertifikat kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pembina kepegawaian atau pihak berwenang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian kompetensi yang telah diberikan.

Untuk mencari nilai realisasinya maka dilakukan survey monitoring pemanfaatan hasil penilaian kompetensi kepada beberapa Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Sampai dengan semester I tahun berjalan, Pusat Penilaian Kompetensi belum melaksanakan kegiatan survey untuk melihat tindak lanjut hasil penilaian kompetensi, karena kegiatan ini baru bisa dilakukan setelah kegiatan penilaian kompetensi diselenggarakan. Pusat Penilaian Kompetensi menjadwalkan kegiatan survey akan dilaksanakan pada semester II sehingga hasil realiasi baru bisa dilihat pada akhir tahun 2023.

Tabel Capaian IKP-1 Semester I

SASARAN PROGRAM:		
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:		
Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
90%	0%	0%

Tabel Realisasi IKP-1 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
0%	0%	-	-

Tabel Perbandingan Realisasi IKP-1 Semester I 2022-2023

2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
85%	49,7%	58,5%	90%	0%	0%

❖ **IKP-2 Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi**

Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa setiap PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi selama 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahunnya. Dalam usaha untuk memenuhi kewajiban institusi dalam mengembangkan kompetensi pegawainya . Kementerian Hukum dan HAM melalui BPSDM Hukum dan HAM menetapkan target pengembangan kompetensi di dalam Rencana Strategis 2020-2024 yang telah disusun.

Pada tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM melalui satuan kerja di bawahnya memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan target 92% dari jumlah PNS Kementerian Hukum dan HAM. Untuk memenuhi target tersebut BPSDM Hukum dan HAM melalui unit dan satuan kerja di bawahnya telah menyusun dan melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.

Selain mengembangkan kompetensi pegawai melalui bentuk pendidikan dan pelatihan, BPSDM Hukum dan HAM juga menggunakan strategi *Corporate University*, yang diluncurkan pada tahun 2019, untuk mengembangkan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Dengan menerapkan strategi ini jangkauan pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Hukum dan HAM lebih besar dan luas, karena bentuk kegiatan pengembangan kompetensi tidak hanya sebatas pelatihan dan pendidikan klasikal saja tetapi bisa dalam bentuk lainnya. Berikut data capaian output dari program dan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM baik melalui unit dan satuannya maupun melalui strategi *Corporate University* selama semester I tahun 2023.

Tabel Capaian Output Pengembangan Kompetensi Semester I

No.	Unit / Satker	Pengembangan Kompetensi			Total
		Pelatihan	Pendidikan	Non-Diklat	
1	Pusbanglat Tekpim	651	-	32.000	32.651
2	Pusbanglat Fungham	504	-	35.754	36.258
3	Badiklat Sulut	2.973	-	516	3.489
4	Badiklat Jateng	360	-	8.027	8.387
5	Badiklat Kepri	449	-	2.495	2.944
6	Poltekip	-	1.348	-	1.348
7	Poltekim	-	1.202	-	1.202
Total		4.937	2.550	78.792	86.279

Tabel di atas menunjukkan bahwa total output pengembangan kompetensi selama semester I tahun 2023 sebesar **86.279** orang telah mengikuti pengembangan kompetensi dengan berbagai metode. Dengan total jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang sebesar 64.646 pegawai dan target pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 sebesar 93% dari jumlah pegawai, maka jumlah target pegawai Kemenkumham yang harus mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak 60.120 pegawai. Dari data pada tabel di atas maka bisa diukur realisasi capaian indikator **Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi** dengan penghitungan sebagai berikut

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{86.279}{64.646} \times 100\%$$

$$Realisasi = 133,4\%$$

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi** sebesar **133,4%**. Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKP-2, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{133,4}{93} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 143,5\%$$

Tabel Capaian IKP-2 Semester I

SASARAN PROGRAM: Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
93%	133,4%	143,5%

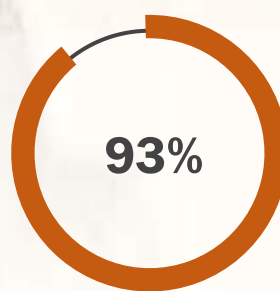
Tabel Realisasi IKP-2 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
58,3%	85,2%	-	-

Grafik Target Capaian IKP-2



Jumlah ASN
Kemenkumham

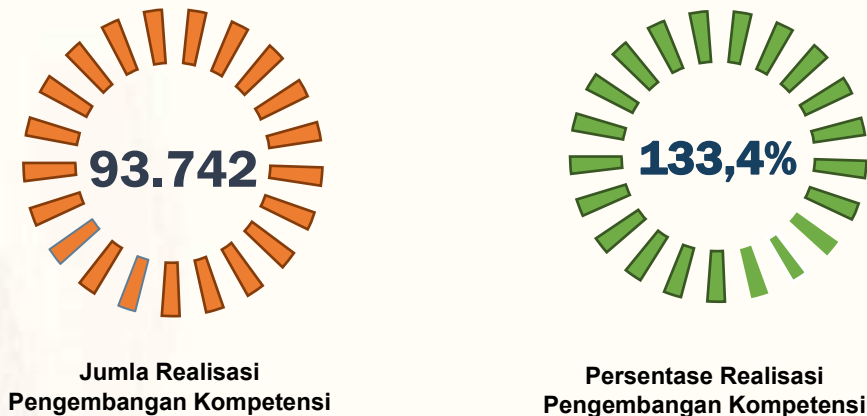


Persentase Target
Pengembangan Kompetensi



Angka Target Pengembangan
Kompetensi

Grafik Realisasi Capaian IKP-2



Dari penyajian data pada tabel dan grafik diatas, dapat dilihat realisasi untuk Indikator Kinerja Program Presentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi selama periode semester I tahun 2023 **melebihi** dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan, adanya kebijakan *Automatic Adjustment* yang berimbas pada pemangkasan anggaran pengembangan kompetensi, BPSDM Hukum dan HAM mampu menghasilkan capaian output yang melebihi dari target yang ditentukan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan kompetensi menjadi penyebab meningkatnya capaian output pengembangan kompetensi seperti :

1. Penyelenggaraan Webinar dengan berbagai macam topik;
2. *Community of Practice (CoP)*
3. *Massive Online Open Course (MOOC)* melalui laman <https://mooc.kemenkumham.go.id>

Pelaksanaan bentuk lain pengembangan kompetensi seperti Webinar, MOOC, dan CoP yang dilakukan BPSDM Hukum dan HAM dan Badiklat Hukum dan HAM memaksimalkan output capaian pengembangan kompetensi karena kegiatan tersebut memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi, sehingga dapat diikuti pegawai Kementerian Hukum dan HAM secara masiv dengan biaya yang murah.

Tabel Perbandingan Realisasi IKP-2 Semester I 2022-2023

2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
92%	40%	43,4%	93%	133,4%	143,5%

Meskipun realisasi dan capaian kinerja pada indikator ini sangat istimewa, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi antara lain:

1. Kualitas yang jaringan internet yang kurang pada penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan metode pembelajaran berbasis teknologi seperti PJJ, e-learning, Webinar dan MOOC;
2. Beberapa peserta pada pelatihan metode e-learning tidak menyelesaikan kegiatan pelatihan;
3. Hasil output pengembangan kompetensi belum terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG.

Beberapa perbaikan yang bisa dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM pada penyelenggaraan pengembangan kompetensi antara lain:

1. Memaksimalkan pelaksanaan bentuk-bentuk pengembangan kompetensi diluar pelatihan klasikal seperti MOOC, Webinar, CoP, dan seterusnya sehingga dapat menjangkau seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM dengan masiv dan berbiaya murah;
2. Menghimbau para atasan langsung peserta pelatihan *e-learning* untuk terus memantau progres pelatihan yang sedang diikuti oleh peserta;
3. Koordinasi dengan Biro Kepegawaian untuk mengintegrasikan hasil pengembangan kompetensi dengan aplikasi SIMPEG

❖ IKP-3 Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya

Salah satu indikator untuk mengukur Sasaran Program Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM adalah **Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya** Indikator kinerja program ini bertujuan mengukur sejauh mana peserta pelatihan setelah kembali melaksanakan tugas di unit organisasi asalnya sudah sesuai dengan kompetensi yang diperoleh pada saat mengikuti pelatihan.

Hal ini agar hasil pelatihan yang telah diikuti oleh alumni pelatihan menjadi kompetensi pegawai tersebut dan dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sehingga apa yang sudah diperoleh dalam kegiatan pengembangan kompetensi berhasil guna baik untuk pribadi alumni maupun organisasi asal alumni. Untuk itu unit dimana alumni tersebut

bertugas diharapkan menempatkan alumni pelatihan di bidang kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan melalui kuesioner evaluasi pasca

pelatihan oleh unit/satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM kepada beberapa responden dengan hasil di bawah ini

Tabel Realisasi Tindak Lanjut Penempatan Alumni Pelatihan
Semester I

Satker	Responden	Penempatan Responden Sesuai Kompetensi	Persentase
Pusbang Fungham	504	504	100%
Pusbang Tekpim	40	38	96,88%
Badiklat Kep. Riau	471	441	93,63%
Total	1.015	983	96,8%

Dari data pada tabel diatas, kemudian dilakukan penghitungan capaian realisasi untuk indikator kinerja ini dengan formulasi sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{983}{1.015} \times 100\%$$

$$Realisasi = 96,8\%$$

Dari penghitungan diatas maka realisasi untuk indikator **Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya** sebesar **96,8%**. Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKP-3, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{96,8}{93} \times 100\%$$

$$Capaian = 104,1\%$$

Tabel Capaian IKP-3 Semester I

SASARAN PROGRAM: Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
93%	96,8%	104,1%

Tabel Realisasi IKP-3 Pertriwulan

1	Q2	Q3	Q4
98,5%	-1,7%	-	-

Tabel Perbandingan Realisasi IKP-3 Semester I 2022-2023

2022			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
92%	50%	55,5%	93%	96,8%	104,1%

Dari hasil pengolahan survey evaluasi pasca pelatihan pada unit dan satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM diperoleh hasil realisasi indikator **Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya** pada semester I sebesar 96,8%. Realisasi ini lebih besar dari target yang telah ditentukan pada tahun 2023 yaitu sebesar 93% alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya. Dari realiasi target tersebut, kemudian dapat kita ketahui capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM pada indikator kinerja ini sebesar **104,1%**. Capaian diatas target ini disebabkan :

1. Peserta yang dikirimkan sesuai dengan kompetensi jabatan yang menjadi prasyarat pelatihan;
2. Materi pelatihan disertai dengan praktek dan simulasi;

3. Kurikulum dan modul telah direview dan diupdate sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan pada setiap jenis pelatihan dan sesuai dengan isu aktual sehingga dapat diaplikasikan oleh alumni peserta pada saat melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

❖ **IKP-4 Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan**

Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) bertujuan untuk menciptakan kader imigrasi dan pemasarakatan yang akan bertugas pada Unit/Satuan Kerja maupun UPT Imigrasi dan Pemasarakatan. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program BPSDM Hukum dan HAM **Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian.**

Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) bertujuan untuk menciptakan kader imigrasi dan pemasarakatan yang akan bertugas pada Unit/Satuan Kerja maupun UPT Imigrasi dan Pemasarakatan. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program BPSDM Hukum dan HAM **Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian.**

Realisasi dan Capaian indikator kinerja ini baru bisa diukur setelah dilaksanakan wisuda tingkat empat pada masing-masing Politeknik pada akhir tahun 2023 yang kemudian akan dikeluarkan Surat Keputusan penempatan lulusan kedua Politeknik. Sehingga untuk realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada semester I ini belum bisa ada hasil penghitungannya. Namun demikian kedua Politeknik tetap melaksanakan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengasuhan kepada para taruna/taruni dalam rangka memenuhi Sasaran Program BPSDM Hukum dan HAM dalam memenuhi SDM dibidang pemasarakatan dan keimigrasian. Berikut jumlah taruna/taruni pada kedua Politeknik. Berikut jumlah taruna/taruni pada kedua Politeknik

No.	Politeknik	Tingkat				Total
		I	II	III	IV	
1	Poltekip	350	350	342	306	1.348
2	Poltekim	311	304	292	295	1.202

Tabel Capaian IKP-4 Semester I

SASARAN PROGRAM: Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasaryaaakatan dan Keimigrasian		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasaryaaakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
95%	0%	0%

B. Realisasi Anggaran

Di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan Menteri Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM menerima anggaran sebesar **Rp. 255.408.806.000,-** untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memenuhi capaian kinerja yang telah ditentukan dalam Sasaran Strategis dan Sasaran Program dengan indikator kinerjanya. Namun, pada awal tahun anggaran berjalan terdapat kebijakan blokir anggaran melalui mekanisme *Automatic Adjustment* sehingga anggaran yang bisa digunakan oleh BPSDM Hukum dan HAM menjadi **Rp. 251.513.012.000,-**. Kemudian pada akhir Semester BPSDM Hukum dan HAM mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sehingga sampai dengan akhir semester I anggaran BPSDM Hukum dan HAM sebesar **Rp. 304.694.164.000,-**

Berikut data penyerapan BPSDM Hukum dan HAM selama semester I per kegiatan sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian kegiatan dalam rangka pemenuhan capaian sasaran strategis dan sasaran program yang menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM.

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Semester I)	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIP)	Rp. 43.260.590.000,-	Rp. 23.025.477.432,-	53,23%
2	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIM)	Rp. 41.637.219.000,-	Rp. 21.947.053.278,-	52,71%
3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM	Rp. 10.959.787.000,-	Rp. 2.604.284.126,-	23,76%
4	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur	Rp. 3.920.800.000,-	Rp. 1.493.837.980,-	38,10%
5	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	Rp. 57.654.155.000,-	Rp. 6.507.604.262,-	11,29%
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 111.596.699.000,-	Rp. 28.604.650.026,-	25,63%
7	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Kepri)	Rp. 8.910.874.000,-	Rp. 4.444.385.811,-	49,88%
8	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Jateng)	Rp. 14.287.752.000,-	Rp. 4.480.461.436,-	31,36%
9	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Sulut)	Rp. 12.466.288.000,-	Rp. 6.428.036.225,-	51,56%
Total		Rp. 304.694.164.000,-	Rp. 99.535.790.576,-	32,67%

Dari tabel realisasi anggaran diatas, sampai dengan akhir semester I tahun anggaran 2023 BPSDM Hukum dan HAM telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 99.535.790.576,-** atau **32,67%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 304.694.164.000,-**. Secara umum realisasi anggaran di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM masih di kurang hal

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM belum sesuai dengan kalender kegiatan yang telah ditetapkan;
2. Realisasi kegiatan dan anggaran belum seluruhnya sesuai dengan rencana penarikan anggaran atau disbursement plan;
3. Terdapat beberapa kegiatan baru pada semester berjalan;

- Masih terdapat keterlambatan di dalam proses administrasi keuangan pada kegiatan yang telah dilaksanakan.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh pimpinan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM untuk menjaga kualitas pengelolaan dan penyerapan anggaran antara lain:

- Penerbitan pedoman Perencanaan dan Revisi Anggaran di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM;
- Pengawasan secara berjenjang dari pimpinan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM atas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan masing-masing.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Untuk mengetahui capaian kinerja anggaran BPSDM Hukum dan HAM semester I tahun 2023 harus dilakukan penghitungan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

- Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu : Capaian Keluaran, bobot 43,5% Penyerapan Anggaran, bobot 28,6% Efisiensi, bobot 18,2% dan Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%. Berdasarkan aplikasi <https://smart.kemenkeu.go.id/> dapat diketahui nilai SMART DJA BPSDM Hukum dan HAM sampai dengan periode semester I sebesar 68,4 dengan kategori Cukup



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Sub komponen penilaian IKPA yaitu: Revisi DIPA, bobot 10%, Deviasi halaman III DIPA, bobot 10%, Data Kontrak, bobot 10%, Penyelesaian Tagihan, bobot 10%, Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%, Dispensasi SPM, bobot 10%, Penyerapan Anggaran, bobot 20%, Capaian Output, bobot 25%, Berdasarkan aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan dapat diketahui nilai IKPA BPSDM Hukum dan HAM sampai dengan semester I sebesar **88,66**.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA												
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN												
Satuan: Ribu, Rp												
No	Kode ESI	Nama ESI	Penerangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Beleja Konstruktif	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
1	01010	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Nilai	108,00	18,84	88,56	80,19	95,64	98,82	100,00	94,34	88,66
			Bobot	40	40	20	10	10	10	5	25	
			Nilai Akar	10,40	4,40	12,11	9,02	9,78	9,95	7,07	21,89	
			Nilai Rata-rata	27,00	11,68	22,14	20,05	23,91	24,71	17,50	23,34	

Dari nilai kedua komponen tersebut kemudian dapat dilakukan penghitungan untuk mencari nilai capaian kinerja anggaran BPSDM Hukum dan H

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai SMART} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (68,4 \times 60\%) + (88,66 \times 40\%)$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = 41,04 + 35,46$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = 76,5$$

Dari hasil penghitungan diatas diperoleh Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 sampai dengan semester I sebesar **76,5** dalam kategori **“Cukup”**.

D. Efisiensi Sumber Daya

Sesuai dengan tema kebijakan fiskal RAPBN 2021 yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi, BPSDM Hukum dan HAM senantiasa melakukan penguatan tata kelola sehingga semakin efektif dan efisien, salah satunya dalam bentuk organisasi yang

semakin ramping, simpel dan melayani masyarakat melalui inovasi dan penerapan teknologi dan informasi dengan baik. Bentuk efisiensi penggunaan sumber daya organisasi dalam mendukung penguatan tata kelola yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM antara lain:

1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kompetensi Berbasis Teknologi

Penyelenggaraan kegiatan berbasis teknologi sudah mulai menjadi kebiasaan di lingkungan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pelatihan dan penilaian kompetensi yang menjadi tugas dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM. Sejak pandemi Covid-19 BPSDM Hukum dan HAM sudah menyelenggarakan pengembangan kompetensi berbasis teknologi seperti Pembelajaran Jarak Jauh, *E-learning*, *Blended-Learning*, *Community of Practice*. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi juga memanfaatkan teknologi informasi dengan metode (Computer based Test) pada pelaksanaan SJT (Situational Judgement Test);

2. Implementasi MOOC Kemenkumham

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pada umumnya adalah keterbatasan waktu akibat banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Salah satu strategi yang digunakan oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah penerapan *Massive Online Open Course* (MOOC) Kemenkumham. MOOC merupakan metode belajar jarak jauh dengan skala besar dan bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja.

MOOC Kemenkumham memberikan kesempatan bagi seluruh ASN Kemenkumham untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sesuai bidang tugasnya tanpa harus mengganggu waktu kerjanya. Untuk semester I tahun 2023 MOOC Kemenkumham menyelenggarakan beberapa jenis MOOC antara lain:

No	MOOC	Output	Pelaksana
1.	Reformasi Birokrasi	14.580	Pusbanglat Tekpim
2.	MTSL	280	Pusbanglat Tekpim
3.	<i>Best Practices</i> Keimigrasian	17.140	Pusbanglat Tekpim
4.	Pemasyarakatan	35.754	Pusbanglat Fungham

5.	Strategi Hubungan Masyarakat Biro Humas Hukum dan Kerjasama Dalam Pengelolaan Informasi di Era Digital	161	Badiklat Hukum dan HAM Kep. Riau
6.	Reformasi Birokrasi	1.289	Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah
Total		69.204	

E. Efisiensi Anggaran

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Berdasarkan penghitungan efisiensi pada aplikasi SMART-DJA diketahui Efisiensi BPSDM Hukum dan HAM sebesar **16,17** dengan Nilai Efisiensi sebesar **90,42**. Apabila dikategorikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 maka Nilai Efisiensi BPSDM Hukum dan HAM termasuk dalam kategori **Sangat Efisien**



F. Capaian Kinerja Lainnya

1. Aplikasi E-Performance

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan

pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Sebagai bagian dari proses pemantauan kinerja e-performance berfungsi antara lain sebagai:

- Mengawal perencanaan kinerja dan keuangan;
- Mengukur kinerja dan keuangan
- Membantu dalam keperluan pembuatan laporan
- Sebagai basis data yang terintegrasi dengan memetakan kinerja secara cascading

Sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM memiliki kewajiban untuk mengunggah data capaian kinerjanya pada aplikasi e-performance secara berkala. Berikut tangkapan layar akun BPSDM Hukum dan HAM pada aplikasi e-performance.

DASHBOARD										KAMPAING		TARGET		HASIL/INDIKATOR		KAD	
NO	KAMPAING	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
8	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
9	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)
10	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)



Tangkapan layar akun BPSDM Hukum dan HAM di atas merupakan realisasi capaian kinerja pada triwulan I tahun 2023, untuk realisasi capaian kinerja semester I belum dimasukkan karena pada saat pengisian capaian terdapat gangguan pada aplikasi e-performance.

2. Aplikasi E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berikut tangkapan layar akun aplikasi e-Monev BAPPENAS semester I



Dari gambar diatas secara umum pelaporan kegiatan BPSDM Hukum dan HAM pada aplikasi pada periode semester I belum berjalan baik, dimana secara rata-rata presentase pelaporan kegiatan BPSDM Hukum dan HAM belum mencapai 100%. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi masing-masing satuan kerja untuk meningkatkan kedisiplinan untuk melaporkan capaian kegiatan pada aplikasi ini, sehingga diharapkan pada akhir tahun bisa mencapai 100% data pelaporannya

Beberapa kendala yang sering dihadapi pada saat pengisian data pada aplikasi ini antara lain:

1. Aplikasi sering mengalami gangguan pada saat mengisi data dukung capaian;
2. Pada saat terjadi revisi anggaran, anggaran yang digunakan pada aplikasi ini masih menggunakan anggaran awal sehingga berdampak pada persentase realisasi anggaran

3. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Target kinerja sebagai bentuk percepatan pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM wajib dilaksanakan oleh semua Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam target kinerja tersebut telah ditetapkan beberapa kegiatan yang sesuai dengan pencapaian perjanjian kinerja pada unit kerja tersebut, termasuk BPSDM Hukum dan HAM. Sebagai salah satu Unit Eselon I, BPSDM Hukum dan HAM juga memiliki beberapa Target Kinerja yang telah ditetapkan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai unit pengembangan dan penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Target Kinerja Kemenkumham 2023 yang menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2023.

Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya. Berikut hasil verifikasi terhadap pelaporan data dukung pelaksanaan target kinerja BPSDM Hukum dan HAM sampai dengan semester I.

1. Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan;

Periode	Target Penerimaan	Capaian	Revisi	Detail Penilaian	Status
2023-01	Penyusunan SK/Pedoman Pembimbing Kemandirian	100%	Revisi 1: SK/Pedoman Pembimbing dan SK/Pedoman Penyusunan dan Pengayahan Penilaian Revisi 2: Pedoman Pembimbing Kemandirian Revisi 3: Pedoman Pembimbing Kemandirian	SK/Pedoman Pembimbing Kemandirian	Selesai
2023-02	Penyusunan Pedoman Pembimbing Kemandirian dan SK/Pedoman Penyusunan dan Pengayahan Penilaian	100%	Revisi 1: SK/Pedoman Pembimbing dan SK/Pedoman Penyusunan dan Pengayahan Penilaian Revisi 2: Pedoman Pembimbing Kemandirian Revisi 3: Pedoman Pembimbing Kemandirian	- Laporan PE 01 2023.pdf - PE 02 2023.pdf - PE 03 2023.pdf - Laporan PE 04 2023.pdf	Selesai

2. Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda;

[illegible]

3. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya

[illegible]

4. Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Pelatihan Alumni Peserta PKP, PKA dan PKN II yang berdampak pada kinerja individu dan organisasi

Indikator	Tujuan Pelaksanaan	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T21-001	Penyusunan SK, TM Evaluasi Pasca Pelatihan Kapasitas Kepemimpinan Organisasi	✓	Keterangan: SK - Haluan Dasar Penyelenggaraan DPP PKP (2023) Keterangan: Indikator - Data dukung lengkap	- SK TM DPP PKP 2023.pdf - Laporan Rapor Penyelenggaraan DPP PKP Tahun 2023.pdf	✓
T21-002	1. Penyusunan Framework Evaluasi Pasca Pelatihan Kapasitas Kepemimpinan Organisasi 2. Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan Kapasitas Kepemimpinan Organisasi	✗	Keterangan: SK - Laporan Rapor Hasil DPP PKP Tahun 2023 yg ditandatangani oleh GBBH	- Laporan Rapor Penyelenggaraan DPP PKP Tahun 2023.pdf - LAPORAN HASIL DPP Tahun 2023 (2023).pdf	✗

5. Kamus Kompetensi Sub Indikator Kompetensi Level IV di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Indikator	Tujuan Pelaksanaan	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T21-003	Rapat Penetapan dan Menentukan Tim Penetapan Tim Publik	✓	Keterangan: SK - SK Tim Penetapan Sub Indikator Materi Level IV Tahun 2022 Keterangan: Indikator - Data dukung lengkap	SK TM Penetapan Sub Indikator Materi Level IV Tahun 2022.pdf	✓
T21-004	Penyusunan Elemen Kompetensi sub Indikator Level IV di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	✗	Keterangan: SK - Data Dukung Rapor Penyelenggaraan Kamus Sub Indikator Level IV	Data Dukung Rapor Penyelenggaraan Kamus Sub Indikator Level IV.pdf	✗

6. Penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi

Indikator	Tujuan Pelaksanaan	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T21-005	1. Penetapan SK, TM dan RK Teknologi 2. Review Indikator Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi	✓	Keterangan: SK - Data dukung berupa 1. Penetapan SK TM dan RK Teknologi 2. Review Indikator Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Keterangan: Indikator - Data dukung lengkap	Penetapan Rencana Strategi Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi.pdf	✓
T21-006	Penyusunan Draft Rencana Strategi Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi	✗	Keterangan: SK - Data Dukung Rencana Strategi Teknologi Informasi DPPSDM Tahun 2023 dan 2024	Data Dukung Rencana Strategi Teknologi Informasi.pdf	✗

7. Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDM Hukum dan HAM melalui Publikasi Ilmiah

Periode	Tujuan Peningkatan	Capaian	Keterangan	Data Peningkatan	Status
T23-803	Peningkatan jumlah publikasi ilmiah Hukum dan HAM Volume 5 No. 1	100%	Keterangan User : Laporan Peningkatan Publikasi Jurnal NYMPS No 1 Tahun 2023 Keterangan Verifikasi : Data diikutsertakan	• Laporan Peningkatan Publikasi Jurnal NYMPS No 1 Tahun 2023.pdf	Terpenuhi
T23-805	Terdapat Jurnal Publikasi Ilmiah Hukum dan HAM Volume 5 No. 1	0%	Keterangan User : Jurnal NYMPS No 1 Tahun 2023	• Jurnal NYMPS No 1 Tahun 2023.pdf • Jurnal NYMPS No 1 Tahun 2023.pdf	Belum terpenuhi

8. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Dosen Politeknik Ilmu Pemasaran

Periode	Tujuan Peningkatan	Capaian	Keterangan	Data Peningkatan	Status
T23-803	Data Diri Dosen dan EKD Tempus Dosen Applied Skills	100%	Keterangan verifikasi : Data diikutsertakan	• EKD Dosen.pdf • Data Diri Dosen PPSM.pdf	Terpenuhi
T23-806	Dosen memiliki sertifikat TGD dan TGD	0%	Keterangan User : Belum terdapat sertifikat TGD dan TGD Dosen Pemasaran	• SERTIFIKAT TGD.pdf • SERTIFIKAT TGD.pdf	Belum terpenuhi

9. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Politeknik Ilmu Pemasaran

Periode	Tujuan Peningkatan	Capaian	Keterangan	Data Peningkatan	Status
T23-803	Relevansi Soal Kompetensi Teknik Pemasaran dan Pemasaran	100%	Keterangan Verifikasi : Data diikutsertakan	• SOAL KOMPETENSI TEKNIK PEMASARAN DAN PEMASARAN.pdf • SOAL KOMPETENSI TEKNIK PEMASARAN DAN PEMASARAN.pdf	Terpenuhi
T23-806	Relevansi Bahan Materi Pemasaran dan Pemasaran	0%	Keterangan User : Belum terdapat relevansi bahan materi pemasaran dan pemasaran	• Bahan Materi Pemasaran dan Pemasaran.pdf • Bahan Materi Pemasaran dan Pemasaran.pdf	Belum terpenuhi

10. Penyelenggaraan Evaluasi Alumni Politeknik Ilmu Pemasaryakatan Sesuai Profil Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan oleh Pengguna Di Bidang Pemasaryakatan

Periode	Target Pemasaryakatan	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T23-001	Penyusunan Standar Instrumen Evaluasi Mutu Publikasi Baru Pemasaryakatan	100%	Keterangan User : Data Tahun Study POLJENP Keterangan Verifikasi : Data dukung lengkap	- Standar Mutu Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan (SMP.pdf) - Kelembagaan STANDAR KUALITAS PENDIDIKAN POLJENP.pdf - PROSES EVALUASI HASIL BELAJAR KUALITAS PENDIDIKAN POLJENP 2021.pdf - DAFTAR PENGARANG HASIL BELAJAR KUALITAS PENDIDIKAN POLJENP TAHUN 2021.pdf	Tersedia
T23-002	Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Uji Evaluasi (dan UPT) Publikasi Ilmiah (Sesuai Standar)	0%	Keterangan User : Berhasil melaksanakan kegiatan penastikan profil, laporan dan publikasi (Sesuai standar) untuk standar Politeknik di bidang Hukum dan UPT Pemasaryakatan	UPT EVALUASI HASIL BELAJAR KUALITAS PENDIDIKAN POLJENP 2021.pdf	Tidak Tersedia

11. Peningkatan Kuantitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Peserta Didik Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Periode	Target Pemasaryakatan	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T23-001	Tersedianya Proposal Penelitian Rancangan Penelitian	100%	Keterangan Verifikasi : Data dukung lengkap	- TEKNOLOGI FEMO (2021).pdf - Proposal Penelitian (Sesuai PIR, PIR.pdf)	Tersedia
T23-002	Peningkatan dan Peningkatan Data Penelitian/Publikasi Ilmiah	0%	Keterangan User : Berhasil melaksanakan kegiatan penastikan Rancangan Penelitian, Laporan Penelitian dan publikasi (Sesuai standar) untuk standar Politeknik di bidang Hukum dan UPT Pemasaryakatan	- PROPOSAL PENELITIAN (Sesuai PIR, PIR.pdf) - PROPOSAL PENELITIAN (Sesuai PIR, PIR.pdf) - PROPOSAL PENELITIAN (Sesuai PIR, PIR.pdf) - PROPOSAL PENELITIAN (Sesuai PIR, PIR.pdf)	Tidak Tersedia

12. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Dosen Politeknik Imigrasi

Periode	Target Pemasaryakatan	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T23-001	Data (Sesuai Standar BPSDM) Tahun Studi Aplikasi Sistem	100%	Keterangan Verifikasi : Data dukung lengkap	- Data (Sesuai Standar BPSDM) Tahun Studi Aplikasi Sistem - Data (Sesuai Standar BPSDM) Tahun Studi Aplikasi Sistem	Tersedia
T23-002	Data (Sesuai Standar BPSDM) Tahun Studi Aplikasi Sistem	0%	Keterangan User : Berhasil melaksanakan kegiatan penastikan Rancangan Penelitian, Laporan Penelitian dan publikasi (Sesuai standar) untuk standar Politeknik di bidang Hukum dan UPT Pemasaryakatan	Data (Sesuai Standar BPSDM) Tahun Studi Aplikasi Sistem	Tidak Tersedia

13. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Politeknik Imigrasi

Periode	Target Pencapaian	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T21-801	Terlaksananya Sistem Manajemen Standar Tertinggi Tera Politeknik Imigrasi	100%	Ketercapaian Realisasi: Data dalam lampiran	1. KEBERSIHAN-FINANSIAL-75 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tera Pencapaian Standar Tera QITEC 20	Terpenuhi
T22-801	Terlaksananya Sistem Standar Proses Dalam RUM	100%	Ketercapaian Realisasi: Data dalam lampiran	1. Sistem Standar Proses Pembelajaran 2. Model Standar Proses Pembelajaran 3. Model Standar Proses Pembelajaran	Terpenuhi

14. Penyelenggaraan Evaluasi Alumni Politeknik Imigrasi Sesuai Profil Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan oleh Pengguna Di Bidang Imigrasi

Periode	Target Pencapaian	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T22-802	Pengawasan Standar Sistem: Evaluasi/Kurasi Politeknik Imigrasi	100%	Ketercapaian Realisasi: Data dalam lampiran	1. KEBERSIHAN-FINANSIAL-75 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tera Pencapaian Standar Tera QITEC 20	Terpenuhi
T23-802	Pengawasan (Kurasi) Alumni pada Unit Eselon I dan UPT/Unit Kerja Wilayah Indonesia	100%	Ketercapaian Realisasi: Data dalam lampiran	1. Laporan Kurasi Alumni Eselon I dan UPT/Unit Kerja Wilayah Indonesia 2. Laporan Kurasi Alumni Eselon I dan UPT/Unit Kerja Wilayah Indonesia 3. Laporan Kurasi Alumni Eselon I dan UPT/Unit Kerja Wilayah Indonesia	Terpenuhi

15. Peningkatan Kuantitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Peserta Didik Politeknik Imigrasi

Periode	Target Pencapaian	Capaian	Keterangan	Data Pendukung	Status
T22-803	Terlaksananya Proses Publikasi Ilmiah Dosen	100%	Ketercapaian Realisasi: Data dalam lampiran	1. KEBERSIHAN-FINANSIAL-75 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tera Pencapaian Standar Tera QITEC 20	Terpenuhi
T23-803	Pengawasan dan Peningkatan Data Penelitian/Ilmiah Publikasi Ilmiah	100%	Ketercapaian Realisasi: Data dalam lampiran	1. Laporan Penelitian/Ilmiah Publikasi Ilmiah 2. Laporan Penelitian/Ilmiah Publikasi Ilmiah 3. Laporan Penelitian/Ilmiah Publikasi Ilmiah 4. Laporan Penelitian/Ilmiah Publikasi Ilmiah 5. Laporan Penelitian/Ilmiah Publikasi Ilmiah 6. Laporan Penelitian/Ilmiah Publikasi Ilmiah 7. Laporan Penelitian/Ilmiah Publikasi Ilmiah 8. Laporan Penelitian/Ilmiah Publikasi Ilmiah	Terpenuhi

Dari tangkapan layar aplikasi monitoring kinerja di atas, sampai dengan semester I BPSDM Hukum dan HAM telah memenuhi data dukung capaian target kinerja. Untuk periode

triwulan I (B03) seluruh target kinerja BPSDM Hukum dan HAM telah terlaksana dan terpenuhi data dukungnya sementara untuk periode triwulan II (B06) semua kegiatan target kinerja telah terlaksana dengan data dukung sebagai buktinya, tetapi sampai dengan penyusunan Laporan ini, data dukung yang telah disampaikan belum diverifikasi oleh Sekretariat Jenderal karena belum masuk masa penilaian.

4. Capaian Prioritas Nasional

Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan amanah untuk melaksanakan Prioritas Nasional yang teknis pelaksanaannya diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sampai dengan semester I tahun 2023 Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan diselenggarakan sebanyak 2 angkatan dengan total 81 peserta dari target sebanyak 320 peserta. Sedangkan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 5 angkatan dengan total 150 peserta dari target 270 peserta. Lebih detilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Capaian Pelatihan Pembimbing Masyarakat

Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan				
Angkatan	Tanggal Pelaksanaan	Output	Pagu	Realisai
I	20 Maret-16 Juni	40	Rp. 3.281.000.000 ,-	Rp. 795.245.773,- (24.24%)
II	2 Mei-18 Juli (Sedang Berlangsung)	41		

Tabel Capaian Pelatihan SPPA

Pelatihan SPPA				
Angkatan	Tanggal Pelaksanaan	Output	Pagu	Realisai
74	3 - 16 Februari 2023	30	Rp. 2,962,525,000 ,-	Rp. 1.701.502.100,- (57.43%)
75	22 Februari- 8 Maret	30		
76	4 - 19 Mei 2023	30		
77	7 - 21 Juni 2023	30		
78	14 Juni - 27 Juni 2023	30		



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM ini merupakan bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. BPSDM Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk menjalankan perannya tersebut BPSDM Hukum dan HAM didukung oleh anggaran yang memadai. Besarnya anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan BPSDM Hukum dan HAM dalam memenuhi kebutuhan unit-unit di Kementerian Hukum dan HAM.

Selama periode Semester I tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM melakukan realisasi anggaran sebesar **Rp. 99.535.790.576,-** atau **32,67%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp. Rp. 304.694.164.000** ,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya terkandung 9 kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 10.959.787.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 2.604.284.126,- atau tercapai 23,76%;

2. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 3.920.800.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1.493.837.980,- atau tercapai 38,10%;
3. Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Kepemimpinan memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 57.654.155.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 6.507.604.262,- atau tercapai 11,29%;
4. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 111.596.699.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 28.604.650.026,- atau tercapai 25,63%;
5. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIP) memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 43.260.590.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 23.025.477.432,- atau tercapai 53,23%;
6. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIM) memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 41.637.219.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 21.947.053.278,- atau tercapai 52,71%;
7. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Kepri) memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 8.910.874.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 4.444.385.811,- atau tercapai 49,88%;
8. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Jateng) memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 14.287.752.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 4.480.461.436,- atau tercapai 31,36%;
9. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Sulut) memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 12.466.288.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 6.428.036.225,- atau tercapai 51,56%.

Selain melaporkan realisasi penyerapan anggaran, laporan ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BPSDM Hukum dan HAM selama semester I tahun 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian maupun capaian Indikator Kinerja Utama Program BPSDM Hukum dan HAM beserta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sampai dengan akhir semester I Tahun 2023, jumlah indikator kinerja yang dapat diukur realisasinya sebanyak 4 buah indikator kinerja, 2 indikator kinerja merupakan indikator pada Sasaran Strategis serta 2 buah indikator kinerja pada Sasaran Program. Sebanyak 2

buah indikator kinerja pada sasaran program belum bisa diukur realisasi dan capaiannya karena baru dijadwalkan baru bisa dilaksanakan pada periode semester berikutnya yaitu:

1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna (Indikator Kinerja Sasaran Program);
2. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan (Indikator Kinerja Sasaran Program)

Sebanyak 3 indikator dari 4 indikator kinerja baik pada sasaran strategis maupun sasaran program yang bisa diukur telah melebihi target yang telah ditentukan antara lain:

1. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya (Indikator Kinerja Sasaran Strategis) dengan realisasi 96,8% dari target 95%;
2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi (Indikator Kinerja Sasaran Program) dengan realisasi 133,4% dari target 93%;
3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya (Indikator Kinerja Sasaran Program) dengan realisasi 145% dari target 93% .

Secara kumulatif besaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPSDM Hukum dan HAM semester I tahun 2023 adalah 55,6. Nilai ini masih dalam kategori kurang. Namun, hal ini tidak bisa disimpulkan selama semester I BPSDM Hukum dan HAM tidak berkinerja dengan baik karena nilai ini merupakan capaian nilai sementara. Nilai ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi pimpinan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM untuk menentukan langkah-langkah percepatan untuk meningkatkan kinerja BPSDM Hukum dan HAM

Berbagai pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan transformasi kelembagaan, serta upaya aktif antikorupsi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap sumber daya yang dimiliki.

B. Saran

Belum tercapainya target realisasi pada masing-masing indikator kinerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, harus menjadi faktor pendorong agar seluruh jajaran BPSDM Hukum dan HAM untuk terus bekerja keras dan cerdas memenuhi target yang telah ditentukan. BPSDM Hukum dan HAM secara berkelanjutan dan terus berusaha mengatasi setiap tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerjanya di masa-masa mendatang.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan BPSDM Hukum dan HAM guna meningkatkan kinerjanya di sisa semester tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan pengembangan kompetensi pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Perencanaan yang dilakukan mengacu pada kebutuhan satuan kerja dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
3. Menyusun dan merencanakan anggaran dengan lebih baik lagi serta mengantisipasi adanya kebijakan *Automatic Adjustment* yang akan dilakukan ditahun berikutnya.
4. Komitmen bersama terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi non-klasikal sama pentingnya dengan pelatihan klasikal, yang berbeda adalah metode pelaksanaannya sehingga tetap dibutuhkan perhatian dan konsentrasi dalam mengikuti pelatihan tersebut.

Langkah-langkah perbaikan dalam rangka pemenuhan capaian kinerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang perlu disusun dan diimplementasikan pada semester II tahun 2023 antara lain:

1. Feedback penilaian kompetensi kepada instansi asal peserta uji kompetensi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Kompetensi dalam rangka menyampaikan masukan yang bersifat konstruktif mengenai pengembangan Assessee yang perlu dilakukan oleh pengguna maupun Assessee itu sendiri berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses penilaian kompetensi yang telah dilakukan. Disamping pelaksanaan *feedback* penilaian kompetensi juga akan diselenggarakan *monitoring* pemanfaatan hasil . kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan valid dari peserta penilaian kompetensi tentang persentase hasil penilaian kompetensi yang telah ditindaklanjuti oleh user. Untuk semester II tahun 2023, Pusat Penilaian Kompetensi telah menjadwalkan kegiatan *feedback* dan *monitoring* pemanfaatan hasil uji kompetensi ke beberapa Kantor Wilayah;
2. Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Pelatihan untuk menentukan relevansi kurikulum untuk pelaksanaan tugas lulusan **pelatihan** dan dampak peningkatan kinerja dan dapat memberikan rekomendasi untuk penempatan lulusan **pelatihan** sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh.

LAMPIRAN

- PERJANJIAN KINERJA 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KAPALABAHAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta berkeadilan pada level, kami yang berjabatan sebagai di bawah ini :

Nama : **Asri Rianto**
Jabatan : **Kasabid Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM**

Sebagaimana tersebut akan bersama :

Nama : **Triana H. Ledy**
Jabatan : **Memberi Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Sebagai alasan pihak pertama, terdapatnya adalah pihak kedua :

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kerja yang akan dicapai sesuai dengan ketentuan ini, dalam rangka mencapai target kerja yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Ketercapaian dan kegagalan pencapaian target kerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan monitoring yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan melaporkan kepada yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Johore, 30 Januari 2022

Pihak Kedua,
Memberi Hukum dan Hak Asasi Manusia



Triana H. Ledy

Pihak Pertama,
Kasabid Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM



Asri Rianto
NIP. 198511181984001001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KAPALABAHAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
KEMAHAMATAN RI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target
(A)	(B)	(C)	(D)
1	Meningkatkan kompetensi keahlian Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase 80% yang telah mengikuti pelatihan kompetensi jabatan 2. Persentase 80% yang telah mengikuti pelatihan	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(A)	(B)	(C)	(D)
1	Tarakan kerja 80% Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di Bidang Pengembangan dan Peningkatan	1. Persentase 80% yang telah mengikuti pelatihan kompetensi jabatan 2. Persentase 80% yang telah mengikuti pelatihan kompetensi jabatan	100%
2	Meningkatkan Kompetensi Asesor Hukum dan HAM Asasi Manusia	1. Persentase 80% yang telah mengikuti pelatihan kompetensi jabatan 2. Persentase 80% yang telah mengikuti pelatihan kompetensi jabatan 3. Persentase 80% yang telah mengikuti pelatihan kompetensi jabatan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(A)	(B)	(C)	(D)
1	Tarakan kerja 80% Persiapan dan Pelaksanaan di Bidang Pengembangan dan Peningkatan	1. Persentase 80% yang telah mengikuti pelatihan kompetensi jabatan 2. Persentase 80% yang telah mengikuti pelatihan kompetensi jabatan	100%
2	Peningkatan Kompetensi Asesor Hukum dan HAM Asasi Manusia	1. Persentase 80% yang telah mengikuti pelatihan kompetensi jabatan 2. Persentase 80% yang telah mengikuti pelatihan kompetensi jabatan 3. Persentase 80% yang telah mengikuti pelatihan kompetensi jabatan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		jumlah Fungsional dan HAM	
		1. Peningkatan status jabatan Fungsional dan HAM yang memiliki kinerja	85%
3.	Terdapatnya proses seleksi bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM	1. Peningkatan jumlah jabatan Fungsional dan HAM yang memiliki kinerja yang sesuai dengan standar kompetensi	100%
		2. Peningkatan pelaksanaan penilaian kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang berbasis teknologi informasi	85%
		3. Peningkatan digital aplikasi aparatur Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pengembangan dan penilaian kompetensi	85%
4.	Terdapatnya penilaian di bidang Teknis dan Keprofesionalan	1. Peningkatan jumlah nilai dengan standar kompetensi teknis dan profesional	85%
		2. Peningkatan jumlah pengembangan penilaian Teknis dan Keprofesionalan	85%
		3. Peningkatan jumlah penilaian Teknis dan Keprofesionalan yang memiliki kinerja	85%
5.	Terdapatnya sistem dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	1. Nilai Maturitas Berbasis	85
		2. Nilai SMART	85
		3. Nilai SMART	85 (Sangat Baik)
		4. Indeks BPS	85 (Sangat Baik)
6.	Terdapatnya penilaian di bidang	1. Peningkatan jumlah pengembangan penilaian di bidang	85%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 256.158.624.000,-
1.	Pengembangan Pendidikan Kedisiplinan	Rp. 14.817.808.000,-
2.	Pengembangan Pengembangan Kompetensi & Sikap Fungsional dan HAM	Rp. 11.298.873.000,-
3.	Pengembangan Peningkatan Kompetensi Aparatur	Rp. 4.908.800.000,-
4.	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Keprofesionalan	Rp. 17.332.325.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 98.308.300.000,-
6.	Pengembangan Sistem Aparatur di Bidang	Rp. 38.904.814.000,-

Jakarta, 20 November 2022

Pihak Setor,
Menteri Hukum dan HAM Agus Salim

Pihak Partner,
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM


Sukarna H. Lasy


Agus Salim
MP. 19091107000001001

● KUESIONER EVALUASI PASCA PELATIHAN

PANDUAN INSTRUMEN KUESIONER UMUM PELATIHAN KEPIMPINAN ADMINISTRATOR

A. Atensi Peserta

Identifikasi Alumni Pelatihan	
Nama/NIP	
Jabatan	
Gelangan	
Unit Kerja	
Instansi	
No.	
No. Telp./Handphone	
Email	

SKALA PEMILAIAN	
Angka	Kategori
5	Sangat Baik
4	Baik
3	Cukup Baik
2	Kurang Baik
1	Tidak Baik

Isi dan Pengisian

1. Peserta dan penilai dengan baik memahami dan isi dari kuesioner.
2. Terdapat dua jenis kuesioner yaitu kuesioner terapan (skala Likert) dan kuesioner terbuka.
3. Untuk kuesioner terapan anda cukup memberi tanda (X) pada kolom angka yang menggambarkan keadaan yang sesuai dengan keadaan anda.
4. Untuk kuesioner terbuka anda cukup menuliskan jawaban dengan singkat dan jelas pada kolom yang diberikan.
5. Jawaban anda dalam mengisi kuesioner ini sangat membantu dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

SELAMAT MENGERJAKAN

No.	Isi dan	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1.	Dampak/BA terhadap Kompetensi					
1.	Menjadi acuan, motivasi, dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan					
2.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
3.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
4.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
5.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
6.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
7.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
8.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
9.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
10.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
11.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
12.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
13.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
14.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
15.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
16.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
17.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
18.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
19.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
20.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
21.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
22.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
23.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
24.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
25.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
26.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
27.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
28.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
29.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
30.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
31.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
32.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
33.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
34.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
35.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
36.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
37.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
38.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
39.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
40.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
41.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
42.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
43.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
44.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
45.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
46.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
47.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
48.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
49.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
50.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
51.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
52.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
53.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
54.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
55.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
56.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
57.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
58.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
59.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
60.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
61.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
62.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
63.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
64.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
65.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
66.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
67.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
68.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
69.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
70.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
71.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
72.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
73.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
74.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
75.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
76.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
77.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
78.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
79.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
80.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
81.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
82.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
83.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
84.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
85.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
86.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
87.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
88.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
89.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
90.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
91.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
92.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
93.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
94.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
95.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
96.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
97.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
98.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
99.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					
100.	Menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi					

**INSTRUMEN EVALUASI PASCA PELATIHAN FUNSIONAL
ANALIS KEPEDAGOGIAN**

DATADIRI

1. Nama Alumni
2. Jenis Kelamin
3. Jabatan
4. Unit/Kelompok
5. Nama Atasan Langsung
6. Nama Rombongan Kerja
7. Apakah tugas yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensi bidang tugas

☐ Ya ☐ Tidak

Form evaluasi diberikan kepada alumni pelatihan, atasan langsung, dan rekan kerja.

No.	Indikator Efektifitas Pasca Pelatihan	Sangat Baik	Cukup	Kurang	Tidak Baik
1.	Kemampuan alumni mengorganisir dan mengelola sumber daya untuk bertindak sesuai misi, visi, dan nilai organisasi				
2.	Kemampuan alumni memonitoring dan mengkoordinasikan tim kerja yang efektif dan efisien				
3.	Kemampuan alumni menetapkan visi/misi secara formal dan informal, bertindak berdasarkan visi dan misi, mengkomunikasikan visi dan misi kepada orang lain yang sesuai, mampu menyusun rencana strategis, politik, prosedur, sistem, dan lain-lain				
4.	Kemampuan alumni memonitoring hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari alternatif metode alternatif untuk meningkatkan kinerja				
5.	Kemampuan alumni mengorganisir dan mengelola sumber daya pelayanan publik secara efisien				
6.	Kemampuan alumni berkolaborasi dengan pihak lain				
7.	Kemampuan alumni mengorganisir dan mengelola sumber daya pelayanan publik secara efisien				

8.	Kemampuan alumni mengorganisir dan mengelola sumber daya pelayanan publik secara efisien				
9.	Kemampuan alumni mengorganisir dan mengelola sumber daya pelayanan publik secara efisien				
10.	Kemampuan alumni mengorganisir dan mengelola sumber daya pelayanan publik secara efisien				
11.	Kemampuan alumni mengorganisir dan mengelola sumber daya pelayanan publik secara efisien				
12.	Kemampuan alumni mengorganisir dan mengelola sumber daya pelayanan publik secara efisien				
13.	Kemampuan alumni mengorganisir dan mengelola sumber daya pelayanan publik secara efisien				

● PRESTASI BPSDM HUKUM DAN HAM





**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAM**

BerAKHLAK
Berprestasi Pelayanan, Berakhlak Kompeten,
memanusiakan segitiga Adaptasi Kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

